

LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA
(GCG)PT. BPR SINARARTA
SEJAHTERATAHUN 2023



JL.YOS SUDARSO NO 381 GOMBONG KEBUMEN
TELEPON: (0287) 473388



BAB I

PENJELASAN UMUM

Pelaksanaan penerapan Tata Kelola wajib dilaksanakan oleh PT. BPR Sinararta Sejahtera sebagai Bank yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG - Good Corporate Governance) pada PT. BPR Sinararta Sejahtera pada tahun 2023 telah membawa perkembangan positif dengan meningkatnya kinerja BPR meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2023 di tengah pemulihan atas dampak pandemi COVID-19 yang menekan dunia usaha dan perbankan. PT. BPR Sinararta Sejahtera memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan penerapan Tata Kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah diatur oleh Regulator (OJK

- Otoritas Jasa Keuangan) sehingga PT. BPR Sinararta Sejahtera dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing industri perbankan khususnya di kota Kebumen.

Dengan penerapan Tata Kelola yang Baik, PT. BPR Sinararta Sejahtera secara konsisten dan berkesinambungan didukung oleh integritas dan komitmen tinggi yang dilakukan melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan dan jenjang organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral dalam pelaksanaan penerapan Tata Kelola di lingkungan PT. BPR Sinararta Sejahtera.

PT. BPR Sinararta Sejahtera telah beroperasi 20 (dua puluh) tahun lebih dan disepanjang tahun 2023 senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Tanggung Jawab (Responsibility), Independensi (Independency) dan Kesenangan (Fairness). Hal ini didorong oleh komitmen Bank menjadi penyedia layanan perbankan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat atau nasabah di Kebumen, yang didukung oleh SDM yang handal agar dapat menciptakan nilai tambah bagi para nasabah atau masyarakat luas.



BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	AGUS WIBOWO, SE
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku. b. Merealisasikan pencapaian target Kinerja Keuangan Bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank. c. Melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dengan memperhatikan aspek kecukupan SDM dan kompetensinya. d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Otoritas lainnya. e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang saham sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. f. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai.		
2.	Nama	:	HERY SUPRIYANTO, SE
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku. b. Membawahkan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko. c. Menetapkan langkah- langkah untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang. d. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari Peraturan Perundang-undangan. e. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas lain. f. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan.		
3.	Nama	:	PAMUNGKAS NAPRIL ISRO NUGROHO, SE, MM
	Jabatan	:	Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Direktur Bisnis bersama Direktur lainnya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola Bank sesuai dengan kewenangan, Anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Bertanggung jawab terhadap penyusunan dan pelaksanaan RBB serta pencapaiannya.		



c. Menindaklanjuti temuan rekomendasi dari Audit Intern BPR, Audit Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK dan Otoritas lainnya. d. Memantau kondisi internal dan perkembangan kondisi eksternal yang mempengaruhi strategi usaha BPR. e. Memastikan terpenuhinya jumlah SDM yang memadai dengan adanya pemisahan tanggung jawab antar masing-masing unit kerja. f. Bertanggung jawab atas penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat.
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris : a. Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis. b. Tingkat Kesehatan Bank telah dipertahankan dalam posisi sehat. c. Direksi telah melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia sesuai rekomendasi Dewan Komisaris yaitu : Melakukan evaluasi kinerja (minimal periode per semester) terhadap seluruh pegawai, memberikan coaching, mentoring dan pembinaan agar lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan. Pemberian sanksi telah dilaksanakan kepada pegawai yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku. Apresiasi juga telah diserahkan bagi pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi PT. BPR Sinararta Sejahtera. d. Memonitor secara ketat debitur yang terdampak dampak COVID-19 agar dapat mendeteksi secara dini setiap potensi kegagalan bayar dan dapat mengantisipasi secara cepat. e. Temuan pemeriksaan OJK telah ditindaklanjuti. f. Temuan Audit Internal telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sosialisasi kepada seluruh terkait pelaksanaan internal control dalam melaksanakan tugas masing-masing.
Penjelasan Lebih Lanjut : NIHIL

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	YOHANES SUCIPTO DADI, SH MM
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi.		
	b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional Bank di seluruh tingkatan/jenjang organisasi.		
	c. Dalam melaksanakan pengawasan Dewan Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		
	d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan danInstansi lainnya.		
	e. Menyetujui Rencana Bisnis yang telah di susun oleh Direksi dan wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis.		
	f. Dewan komisaris wajib memberitahukan :		
	a). Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan		
	b). Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran atau keadaan atau perkiraan dimaksud.		
	Rekomendasi Kepada Direksi :		
	a. Melaksanakan penerapan Tata Kelola secara konsisten dan penerapan Manajemen Risiko		



yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.

b. Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank selalu dalam posisi sehat.

c. Secara rutin melakukan pengelolaan sumber daya manusia sesuai rekomendasi Dewan Komisaris yaitu : Melakukan evaluasi kinerja (minimal periode per semester) terhadap seluruh pegawai, memberikan coaching, mentoring dan pembinaan agar lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan. Pemberian sanksi telah dilaksanakan kepada pegawai yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku. Apresiasi juga telah diserahkan bagi pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi PT. BPR Sinararta Sejahtera.

d. Semua komitmen perbaikan atas temuan pemeriksaan OJK agar segera ditindaklanjuti.

e. Menindaklanjuti semua temuan Audit Internal dan segera mengambil langkah- langkahperbaikan control agar tidak terjadi kembali temuan berulang apalagi bersifat signifikan.

f. Melaksanakan operasional bisnis BPR sesuai Rencana Bisnis yang telah disusun setiaptahun.

g. Memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit dan meningkatkan sistem pengendalian resiko secara melekat diseluruh aspek perkreditan.

Penjelasan Lebih Lanjut :

NIHIL

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
NIHIL	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.				
2.				
3.				
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		:	NIHIL	



c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
NIHIL			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	AGUS WIBOWO, SE	Rp0	0%
2.	HERY SUPRIYANTO, SE	Rp0	0%
3.	PAMUNGKAS NAPRIL ISRONUGROHO, SE, MM	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
NIHIL			



2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	AGUS WIBOWO, SE	-	-	0%
2.	HERY SUPRIYANTO, SE	-	-	0%
3.	PAMUNGKAS NAPRIL ISRONUGROHO, SE, MM	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
NIHIL				

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	AGUS WIBOWO, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	HERY SUPRIYANTO, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	PAMUNGKAS NAPRIL ISRONUGROHO, SE, MM	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
NIHIL				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	AGUS WIBOWO, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	HERY SUPRIYANTO, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	PAMUNGKAS NAPRIL ISRONUGROHO, SE, MM	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
NIHIL				



D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	YOHANES SUCIPTO DADI, SHMM	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
NIHIL			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	YOHANES SUCIPTO DADI, SHMM	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
NIHIL				

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	YOHANES SUCIPTO DADI, SH MM	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
NIHIL				



2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	YOHANES SUCIPTO DADI, SH MM	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
NIHIL				

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan(Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan(Rp)
1.	Gaji	3	Rp808.000.000	1	Rp151.200.000
2.	Tunjangan	3	Rp56.500.000	1	Rp11.000.000
3.	Tantiem	2	Rp189.950.000	1	Rp41.790.000
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0
5.	Remunerasi Lainnya	3	Rp7.000.000	1	Rp3.000.000
Total			Rp1.061.450.000		Rp206.990.000
Penjelasan Lebih Lanjut :					
NIHIL					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	MOBIL (3)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan (3), Asuransi (3)	BPJS Kesehatan (1), Asuransi (1)
4.	Fasilitas Lainnya	BPJS Ketenagakerjaan (3)	BPJS Ketenagakerjaan (1)
Penjelasan Lebih Lanjut :			
- Anggota Direksi masing-masing mendapatkan fasilitas kendaraan dinas untuk operasional. - Anggota Dewan Komisaris tidak mendapatkan fasilitas kendaraan dinas. - Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi masing-masing mendapatkan fasilitas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.			



G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	5 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.82 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3.46 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
NIHIL	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	19 Januari 2023	3	Pembahasan Evaluasi RBB tahun 2022
2.	21 Februari 2023	6	Pembahasan Kredit Restrukturisasi dan kredit NPL.
3.	24 Maret 2023	4	Pembahasan Audit Internal, Kepatuhan dan Manrisk, Laporan APU/PPT dan pengkinian data.
4.	10 Juli 2023	3	Pembahasan Evaluasi RBB semester I tahun 2023.
5.	25 Juli 2023	4	Pembahasan evaluasi perkembangan persiapan pembukaan Kantor Cabang Kutoarjo.
6.	01 November 2023	4	Pembahasan seleksi Koordinator Remedial, pembahasan SDM dan Program Semarak Akhir Tahun 2023.
7.	16 November 2023	11	Pembahasan dan penetapan RBB PT. BPR Sinararta Sejahtera tahun 2024.
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
- Untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis di tahun 2023, akan mengoptimalkan kinerja Kantor Cabang Kroya dan Cabang Kutoarjo serta team pusat sehingga RBB tahun 2023 bisa dicapai lebih baik. - Maintenance kredit agar dilakukan secara konsisten sehingga kita bisa mendeteksi lebih awal jika ada penyimpangan penggunaan kredit. - Menindaklanjuti arahan OJK dan membahas terkait perkembangan bisnis makro dan kebijakan-kebijakan baru. - Mengoptimalkan ekspansi kredit dengan menysasar segmen kredit baru yang terus tumbuh			



dengan tetap prudent dan menjaga kualitas kredit tetap baik.

- Menindaklanjuti hasil rapat bulan Maret 2023 untuk pembahasan permasalahan Audit Internal, Kepatuhan dan Manrisk dan APU/PPT.
- Pembahasan pemenuhan kandidat Koordinator Remedial, Kepala Cabang Kroya dan Komisaris serta Program Semarak tahun 2023.
- Pembahasan dan penetapan Rencana Bisnis BPR Sinararta Sejahtera tahun 2024.

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	YOHANES SUCIPTO DADI, SH MM	7	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
- Kehadiran anggota Dewan Komisaris selama 1 (satu) tahun yaitu Bapak Yohanes SuciptoDadi, SH. MM frekuensi kehadiran 97 (sembilan puluh tujuh) kali. - Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat 7 (tujuh) kali dalam 1 (satu) tahun dengan rincian rapat melalui tatap muka.				

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
NIHIL								



J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	1	0
Total	1	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Gugatan Debitur an Makhrur pokok gugatan, penggugat menuntut agar lelang yang dilakukan BPR Sinararta Sejahtera yang telah beralih hak kepada pemenang lelang dinyatakan batal demi hukum dan penggugat menuntut agar dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah yang dilelang. Putusan Pengadilan Negeri Banyumas No 7/ Pdt.G/2023/ PN Bms tanggal 4 September 2023 menolak gugatan penggugat seluruhnya. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No 411/ PDT/2023/ PT SMG tanggal 26 Oktober 2023 menguatkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Banyumas No 7/Pdt.G/2023/PN Bms tanggal 4 September 2023. Saat ini permasalahan hukum tersebut masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							
Penjelasan Lebih Lanjut :							
NIHIL							

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	13 April 2023	Sosial	Sumbangan DPC Pertuni Kebumen	Panitia	Rp300.000
2.	08 Mei 2023	Sosial	Sumbangan Pembangunan Masjid Ar Rahman Kodim 0709/ Kebumen	Panitia	Rp1.000.000
3.	12 Mei 2023	Sosial	Sumbangan Yayasan Nurul	Panitia	Rp150.000



			Wathon Condong Campur.		
4.	31 Juli 2023	Sosial	Sumbangan Anak Yatim dan Kaum Dhuafa Paguyuban Audio System Karanggayam.	Panitia	Rp750.000
5.	07 Agustus 2023	Sosial	Sumbangan HUT RIKe 78 Desa Wonokriyo	Panitia	Rp300.000
6.	09 Agustus 2023	Sosial	Sumbangan HUT RIKe 78 Kecamatan Kroya.	Panitia	Rp200.000
7.	20 November 2023	Sosial	Sumbangan Kegiatan PORTI (Perhimpunan Olahraga Tunanetra Indonesia) Kebumen	Panitia	Rp500.000
8.	22 November 2023	Sosial	Doorprize HUT KORPRI Ke 52 Cilacap.	Panitia	Rp3.000.000
9.	22 Februari 2023	Sosial	Sumbangan Bantuan Sosial Korban Banjir Bandang di Surakarta Solo.	Panitia	Rp100.000
10.	19 Desember 2023	Sosial	Partisipasi Pengamanan Polsek Gombong dalam rangka Perayaan Natal dan Tahun Baru 2024.	Panitia	Rp1.000.000
11.	23 Desember 2023	Sosial	Sumbangan Anak Yatim dan Kaum Dhuafa Masjid Nurrohmah Gombong.	Panitia	Rp800.000
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
NIHIL					



BAB III

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUMPENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT. BPR Sinararta Sejahtera
Alamat	: JL.YOS SUDARSO NO 381 GOMBONG KEBUMEN
Nomor Telepon	: (0287) 473388
Posisi Laporan	: Desember 2023
Modal Inti	: Rp8.118.109.946
Total Aset	: Rp102.118.772.476

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR Sinararta Sejahtera Tahun 2023, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 2 dengan predikat Baik (2)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.69	0.338
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2.38	0.357
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2.00	0.200
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.18	0.218
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.00	0.200
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.00	0.050
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1.89	0.189
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2.00	0.150
10	Rencana Bisnis BPR	2.00	0.150
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2.00	0.150
Nilai Komposit			2.000
Predikat Komposit			Baik



B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.69)

Jumlah anggota Direksi 2 (dua) orang dan salah satunya Direksi Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan. Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan serta telah diangkat melalui RUPS. Anggota Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 2.38)

Jumlah anggota Dewan Komisaris hanya 1 (satu) orang dikarenakan 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris tidak diperpanjang masa jabatannya. Anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan serta telah diangkat melalui RUPS. Anggota Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan sudah ada Rapat Dewan Komisaris yang memberikan rekomendasi kepada Direksi.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Tidak menerapkan Komite.

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2)

BPR dalam menangani Benturan Kepentingan diselesaikan dengan musyawarah mufakat dan tidak merugikan BPR atau melanggar peraturan yang berlaku.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.18)

BPR sudah memiliki Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang independen yang bertanggung jawab kepada Direktur YMFK, sudah memiliki pedoman dan kebijakan fungsi kepatuhan dan membuat laporan tahunan kepada OJK.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2)

BPR sudah memiliki pedoman dan kebijakan audit intern dan sudah ada Pejabat Eksekutif Audit Intern yang independen terhadap kegiatan operasional BPR serta tanggung jawab kepada Direktur Utama. Menyusun laporan tahunan kepada OJK.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 2)

BPR telah menunjuk KAP untuk melakukan audit laporan keuangan BPR sesuai ketentuan OJK.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1.89)

BPR sudah menerapkan Manajemen Risiko cukup baik sesuai dengan ketentuan OJK. BPR sudah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko dan penetapan Limit Risiko. BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material.



9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2)

BPR tidak melanggar BMPK, untuk mencegah terjadinya BMPK salah satunya adalah dengan membandingkan realisasi kredit dan penempatan dana dengan Modal Inti, serta dipantau rasio keuangan.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2)

RBB telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Visi dan Misi BPR. RBB menggambarkan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan OJK. RBB BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit : faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2)

Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk SDM yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh. Laporan keuangan disusun sesuai ketentuan yang berlaku, transparansi, ditandatangani Direksi dan disampaikan ke OJK tepat waktu.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa :

Faktor Positif Aspek Governance Structure adalah BPR senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta tugas yang telah ditetapkan serta tugas pokok dan fungsi masing- masing struktur organisasi telah berjalan dengan baik. Sedangkan dari sisi Faktor Negatif Aspek Governance Structure bahwa untuk mendukung operasional BPR Sinararta Sejahtera masih dibutuhkan rekrutmen SDM yang berkualitas untuk mengisi beberapa posisi yang kosong.

Untuk Faktor Positif Aspek Governance Process yaitu Tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan baik. BPR senantiasa mendorong budaya Kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko. Sementara untuk Faktor Negatif Aspek Governance Process adalah BPR perlu untuk melakukan kaji ulang dan mengkinikan Kebijakan dan SOP yang dimiliki agar selaras dengan ketentuan terbaru dari regulator dan dapat merespon perkembangan, tantangan bisnis dan operasional BPR yang terjadi saat ini.

Dari sisi Faktor Positif Aspek Governance Output bahwa BPR masih dapat beroperasi dengan baik dan dapat mencetak kinerja yang baik. Kecukupan permodalan masih cukup memadai, dapat mengcover potensi kerugian dan dikelola dengan baik sesuai skala usaha dan kompleksitasnya. Sedangkan dari sisi Faktor Negatif Aspek Governance Output yaitu selama tahun 2023 masih terdapat pengenaan sanksi oleh regulator.

Namun kedepannya untuk Faktor Positif dan Faktor Negatif Aspek Governance dapat terlaksana lebih baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Gombong, 24 Januari 2024

PT. BPR Sinararta Sejahtera

Menyetujui,

AGUS WIBOWO, SE
DIREKTUR UTAMA



PT. BPR SINARARTA SEJAHTERA

YOHANES SUCIPTO DADI, SH. MM
KOMISARIS UTAMA

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT. BPR Sinararta Sejahtera

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

666067-1-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-601470-25012024140204

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

sinararta@yahoo.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-25 14:02:04



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.



PT. BPR SINARARTA SEJAHTERA

Jl. Yos Sudarso No. 381 Gombong - Kebumen Telp. 0287 - 473388 Fax. 0287 - 473377

email : sinararta@yahoo.com website : www.bprsas.com

Nomor : 019/SAS/II/2023
Tanggal : 25 Januari 2023
Lampiran : 1 (satu) Berkas

Kepada
Rumah Perbarindo
Komp. Patra II No.46
Jl. Jend Ahmad Yani Bypass Cempaka
Cempaka Putih, Jakarta Pusat

Perihal : **Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2023 PT. BPR Sinararta Sejahtera PT. BPR Sinararta Sejahtera.**

Menunjuk ketentuan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat serta SEOJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dengan ini kami sampaikan **Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2023 PT. BPR Sinararta Sejahtera.**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.

Hormat kami,

Agus Wibowo, SE
Direktur Utama